

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat penting bagi kehidupan ekonomi dan sosial suatu negara. Kontribusi dari penduduk menciptakan pendapatan pajak yang mendanai proyek-proyek pembangunan nasional. Sepertiga dari semua pendapatan negara berasal dari pajak penghasilan, Bersumber dari Catatan Keuangan 2019. Pajak sangat diperlukan dan dikendalikan.

Kepatuhan Wajib Pajak mempertunjukkan kesesuaian dan efektivitas sistem perpajakan. Bersumber dari Yustinus Prastowo dalam laporan CNBC Indonesia 2018 (Berita DDTC,2019), 70% wajib pajak orang pribadi telah mengajukan SPT. Tinggi sebelumnya 67,4% ditingkatkan sebesar 2,6%. Untuk membangun infrastruktur suatu negara, pajak diperlukan. Program sukarelawan pajak, cincin pajak, dan pidato pajak telah dipromosikan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pajak. Penagihan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi mendapat manfaat dari kepatuhan, Bersumber dari Olivia Jessica (2017) dan Patar Simamora (2015).

Ini juga melakukan pemeriksaan pajak untuk mempromosikan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak membantu menangkap para penghindar pajak. Inspeksi ialah bagian dari proses pemantauan dan pengawasan kegiatan kelompok. Studi Olivia Jessica mempertunjukkan bahwasannya melihat pengembalian pajak membantu mereka (2017). Audit memiliki pengaruh kecil pada pengembalian pajak individu, kata Meida et al (2018). Hasil ini menentang penelitian sebelumnya. Tentu saja, wajib pajak harus bekerja sama terlebih dahulu. Kontra-interpretasi akan membantu masyarakat di semua tingkatan di masa depan. Jika wajib pajak diaudit, dia akan berpikir dua kali untuk melanggar undang-undang perpajakan.

Surat ketetapan pajak juga dapat mengubah jumlah pajak penghasilan yang dikumpulkan. Ini merangkum kinerja keuangan perusahaan untuk periode akuntansi tertentu. Surat ketetapan pajak ialah sah. SKPKB diterbitkan jika Wajib Pajak menunggak. Singkatnya, SKPKB ialah pajak. Andi Rustam(2020) menilai Surat Ketetapan Pajak bermanfaat bagi penerimaan pajak orang pribadi. Bersumber dari Dwi Kartikaningrum, SKP memiliki pengaruh minimal terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (2018). Penelitian lain menemukan bahwasannya SKP memiliki dampak minimal terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan ialah denda atau sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Elfin Siamena (2017) berpendapat hukuman pajak meningkatkan pengumpulan pendapatan. Wajib Pajak yang tidak melanggar hukum tidak dikenakan denda. Dengan kata lain, pengajuan tepat waktu menghindari hukuman. Kepatuhan pajak secara otomatis akan meningkat. Penerimaan pajak akan meningkat di masa yang akan datang seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Surat Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Ketetapan mempengaruhi pemungutan pajak penghasilan orang pribadi. Akademisi lain tertarik untuk melakukan studi baru karena hasil studi sebelumnya sangat berbeda. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Peneliti memilih KPP Pratama Medan Barat karena merupakan salah satu KPP yang konsisten memungut pajak di Kota Medan (Tribun News, 2018). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat”**.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Ketaatan, kepatuhan, dan kepatuhan dipertunjukkan oleh sejauh mana kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Untuk memahami hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kepastian hukum. Untuk suatu sistem hukum yang baik, Bersumber dari pengertian ini, semua hukum yang diciptakan dalam sistem hukum itu harus dipatuhi. Jika wajib pajak berlaku rajin dan mengikuti semua aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku, kepatuhan dapat dipertunjukkan. Kepatuhan meningkat ketika lebih banyak wajib pajak yang mematuhi aturan. Lebih banyak kepatuhan berarti lebih banyak penerimaan pajak. Umumnya, aturan pajak diberlakukan untuk memastikan operasi pengumpulan pajak yang lancar dan pertumbuhan tahunan. SPT sering dipergunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Ketika seseorang mengajukan pengembalian pajak mereka, mereka memasukkan jumlah pajak yang terutang, yang dipergunakan untuk menghitung

pendapatan pajak pendapatan tahunan pemerintah.

1.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan pajak ialah salah satu cara untuk memerangi penggelapan pajak. Inspeksi ialah bagian dari proses pemantauan dan pengawasan operasi kelompok tertentu. Bersumber dari asas kepastian hukum, pemeriksaan mengarah pada peningkatan pemungutan pajak. Kepastian hukum menjamin bahwasannya peraturan perpajakan diterapkan dengan benar, tanpa celah atau peluang kecurangan. Pemeriksaan ialah semacam undang-undang anti penghindaran pajak. Pelaksanaan audit secara langsung akan mempengaruhi pemungutan pajak. DJP akan mengetahui sejauh mana tindakan atau tindakan kecurangan dapat dikurangi atau dihilangkan melalui audit, sehingga tidak ada celah yang dapat mengakibatkan kerugian penerimaan pajak negara. Dapat dikatakan bahwasannya semakin banyak audit yang dilakukan, semakin banyak uang pajak yang dihasilkan. Jumlah realisasi SKPKB yang diterbitkan dipergunakan untuk menghitung jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Jumlah SKPKB yang diterbitkan dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pemeriksaan yang diselesaikan dan dilaporkan dalam suatu laporan.

1.2.3 Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat dipergunakan untuk memeriksa kinerja organisasi dengan mengumpulkan data keuangannya dari waktu ke waktu. Mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena wajib pajak harus membayar baik pokok pajak maupun denda pajak, maka Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan kerugian bagi wajib pajak. Sehingga secara langsung dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Di luar kenyataan bahwasannya pembayar pajak merugi, negara memperoleh keuntungan karena dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pajak selalu dihitung ulang sesuai dengan gagasan sistem penilaian resmi, yang mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi apakah pajak yang terutang sepadan dengan yang seharusnya dibayar, yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

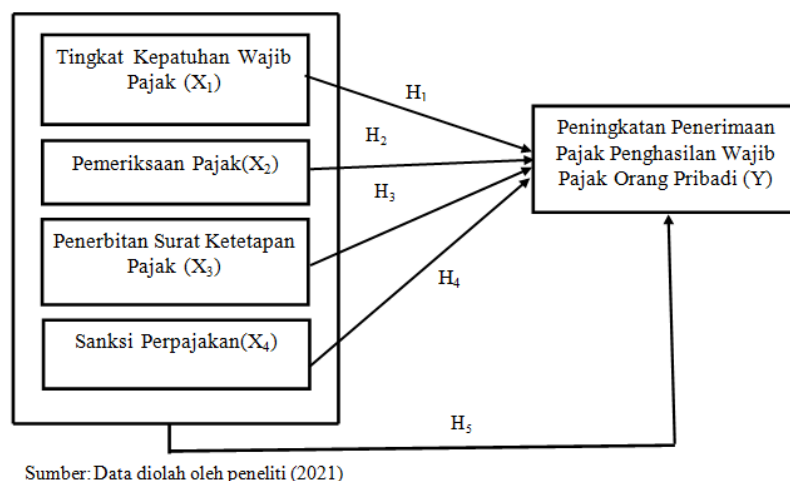
1.2.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Sanksi Perpajakan ialah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang terbukti bersalah dan melakukan tindak pelanggaran di bidang perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dan berpikir dua kali jika memiliki keinginan untuk berperilaku tidak patuh. Elfin Siamena (2017)

menjelaskan bahwasannya sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan beberapa bentuk sanksi perpajakan yang sedemikian rupa supaya menimbulkan efek jera bagi wajib pajak, yaitu dapat berupa denda, bunga, ataupun kenaikan. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkat. Tingkat kepatuhan yang semakin meningkat juga akan memberikan manfaat yang baik bagi negara, yaitu penerimaan pajak akan ikut meningkat.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012). Model kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.2.5 Hipotesis Penelitian

H_1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H_2 : Pemeriksaan Pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H_3 : Penerbitan Surat Ketetapan Pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H_4 : Sanksi Perpajakan secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H_5 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerbitan Surat Ketetapan

Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berdampak positif dan signifikan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi